JDEP Vol. 7, No. 3 (2024) 181-193
JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan

Analisis Peranan Upah Minimum Provinsi dan Kontribusi Pendapatan Perempuan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Indah Nurlailatin* dan Sena Wijaya

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

Corresponding Email: indahnrlatn@gmail.com

Abstract

The high rates of poverty in Papua, West Papua, and East Nusa Tenggara (NTT) are the driving force for this research. This research seeks to examine the impact of women's financial contributions and the provincial minimum wage on poverty reduction in these regions between 2015 and 2022. The poverty rate is the dependent variable in this study, while the provincial minimum wage and women's income contribution are the independent variables. The Central Bureau of Statistics was the source of data acquisition, while the EViews program was used in this research methodology to conduct regression analysis. During the testing stage, significance tests and classical assumption tests were used to ascertain the *causal connection between the variables. The findings indicate that women's income contributions and the province's minimum wage have a significant impact on the area's poverty rate. The conclusion of this study emphasizes the important role that the minimum wage and women's income contribution play in developing measures to combat poverty in the provinces of Papua, West Papua, and East Nusa Tenggara (NTT). The conclusions can provide strong justification for the development of more effective policies in improving welfare and addressing poverty in these areas.*

Keywords: *Provincial Minimum Wage, Women's Income Contributions, and Poverty*

JEL Classification: *J31, J16, and I32*

https://doi.org/10.14710/jdep.7.3.181-193

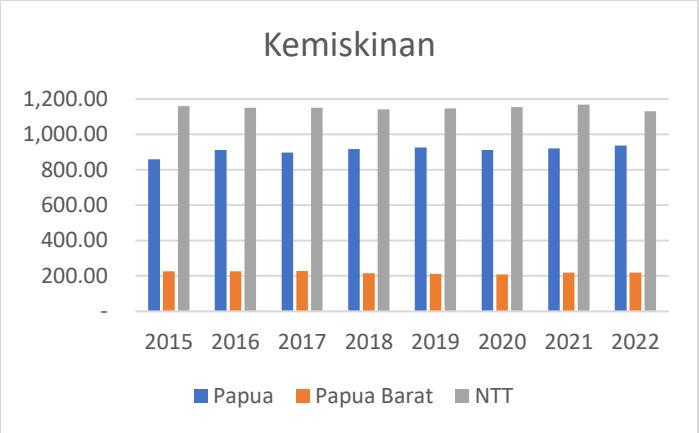
This is an open-access article under the CC BY-SA 4.0 license

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi tantangan sosial-ekonomi utama di Indonesia. Kemiskinan telah lama menjadi topik pembicaraan, baik di tingkat nasional maupun regional (Faritz & Soejoto, 2020). Ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier setiap individunya serta kebutuhan kelompok (kehidupan yang baik, kesehatan, dan pendidikan), maka terjadilah kemiskinan. Dampak dari kondisi kemiskinan, salah satunya adalah menurunnya mutu sumber daya manusia sehingga cenderung mengakibatkan penghasilan yang rendah (Wulandari & Ratnasari, 2022). Penyebab kemiskinan dilihat dari berbagai sudut terdiri dari variabel geografis, sosial, dan ekonomi.

*Corresponding Author: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No.24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Indonesia, indahnrlatn@gmail.com

Di Indonesia, provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi pusat perhatian dalam perdebatan mengenai upaya pengentasan kemiskinan. Fenomena kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut mencuat sebagai tantangan yang kompleks. Provinsi Papua dan Papua Barat dihadapkan pada tantangan kemiskinan yang terkait dengan ketimpangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan isu sosial-politik. Sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya memberikan manfaat kepada penduduk setempat, sementara konflik sosial dapat menjadi hambatan untuk pembangunan (Rahayu, 2021). Sedangkan NTT dibatasi oleh keterpencilan geografis dan kerentanan terhadap bencana.



Gambar 1. Kemiskinan Tahun 2015-2022
Sumber: BPS diolah penulis, 2024

Gambar diagram di atas menunjukkan bahwa kemiskinan sangat fluktuatif di ketiga provinsi tersebut. Penurunan terbesar di Papua terjadi pada 2016–2017 dari sekitar 911,33 ribu jiwa menjadi 897,69 ribu jiwa. Di Papua Barat, penurunan paling signifikan terjadi pada 2017-2018 dari sekitar 228,38 ribu jiwa menjadi 214,47 ribu jiwa. Sementara di NTT juga menunjukkan angka kemiskinan yang naik turun setiap tahunnya, dengan penurunan signifikan dari sekitar 1169.31 ribu jiwa pada 2021 menjadi 1131.62 ribu jiwa pada 2022. Berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, jumlah penduduk miskin di ketiga provinsi ini masih sangat tinggi, meskipun mengalami penurunan. Selama pandemi COVID-19 tahun 2020-2021, jumlah penduduk miskin meningkat. Namun, kabar baiknya, Provinsi NTT dan Papua Barat mengalami penurunan pada tahun 2022, sedangkan Provinsi Papua mengalami kenaikan. Dengan menggunakan semua sektor untuk berkolaborasi akan membantu mengurangi kemiskinan (Adnan & Amri, 2020).

Dua instrumen sering dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan. Pertama, upah minimum provinsi (UMP) dimaksudkan menjamin upah yang layak bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar (Ansori, 2018). Kedua, keterlibatan ekonomi perempuan menambah pendapatan rumah tangga dan mendukung pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan.

Upah yang memadai dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Keputusan penetapan UMP juga berkontribusi pada pengurangan ketidaksetaraan ekonomi, pemerataan pembangunan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan sosial. Namun, kenaikan UMP di setiap provinsi biasanya dipengaruhi oleh kenaikan harga barang sehingga membuat UMP

juga tidak bisa menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat (Rahayu, 2021). Jadi, meskipun provinsi tersebut memiliki UMP yang tinggi, belum tentu tingkat kemiskinannya rendah karena harga kebutuhan barang yang selalu meningkat menjadikan provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi.

Kontribusi ekonomi perempuan tidak hanya mendiversifikasi pendapatan rumah tangga dan mendukung sektor ekonomi yang beragam, tetapi juga mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan (Abda & Cahyono, 2022). Dengan peningkatan pendapatan perempuan, keluarga dapat lebih efektif memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan. Akses yang lebih besar terhadap peluang pekerjaan dan pendapatan memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan pokok (Adnan & Amri, 2020). Kontribusi finansial perempuan juga dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan generasi muda. Analisis ini memberikan wawasan yang kaya tentang peran perempuan dalam mengatasi kemiskinan, membentuk dasar bagi kebijakan inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mempertimbangkan kontribusi pendapatan perempuan sebagai elemen utama dalam penelitian adalah langkah esensial untuk menciptakan perubahan positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Studi yang dirujuk dalam penelitian ini sebagian besar dilakukan di wilayah lain, seperti Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Kota Surabaya. Sepengetahuan penulis, bukti yang menguji UMP dan pemberdayaan gender secara bersamaan untuk Papua, Papua Barat, dan NTT masih terbatas, padahal ketiganya memiliki sektor informal dan pertanian yang luas serta tingkat harga yang sangat berbeda. Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi menjadi fenomena kunci yang perlu dijelajahi, dengan penelitian yang akan mengeksplorasi kontribusi pendapatan perempuan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Studi ini menyajikan bukti panel eksploratif untuk mengisi sebagian kekosongan tersebut. Kontribusinya sengaja dibatasi pada 24 observasi dan dua variabel penjelas.

Penelitian ini dikonseptualisasikan dalam kerangka teoritis ekonomi feminis yang menyoroti peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, teori pembangunan manusia akan digunakan untuk mengukur dampak upah minimum dan pendapatan perempuan terhadap kemiskinan. *Grand* teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menginterpretasikan hasil analisis dalam konteks pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi. Kebaruan penelitian terletak pada pemahaman mendalam terkait dinamika hubungan antara upah minimum, partisipasi perempuan dalam ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri.

Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara ekonomi individu atau kelompok untuk menjalani atau mencapai kualitas hidup rata-rata yang biasa dinikmati oleh sebagian besar orang di suatu daerah. Keterbatasan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal adalah ciri khas dari ketidakmampuan ini (Qurrotu'aini & Bagus Putu Purbadharmaja, 2023). Tidak adanya sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup secara finansial dan/atau

memperoleh bentuk-bentuk kekayaan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikenal sebagai dimensi ekonomi dari kemiskinan (Tumangkeng, 2019).

Upah Minimum Provinsi

Upah minimum merupakan standar minimal yang diberlakukan oleh pemberi kerja dan sektor industri lainnya kepada para pekerja di tempat kerja. Tujuan utama penetapan upah minimum adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pekerja dalam hal kesejahteraan, produktivitas, dan kesehatan terpenuhi di antara standar hidup dasar lainnya (Anggriawan et al., 2016). Biaya sosial dari inflasi yang mengakibatkan seseorang menjadi miskin berdampak pada bagaimana upah minimum memengaruhi kemiskinan.

Kontribusi Pendapatan Perempuan

Sebab adanya dorongan terhadap kebutuhan, keinginan, dan bakat, serta ketersediaan peluang kerja dan akses bagi perempuan untuk mengakses peluang tersebut, maka menjadi sebuah fenomena bahwa perempuan bekerja untuk mencari nafkah (Dahlia, 2019). Mengatasi kesulitan keuangan keluarga mereka adalah kekuatan pendorong utama di balik pekerjaan perempuan. Perempuan yang bekerja berkontribusi pada rumah tangga melalui pendapatan mereka, dengan metrik yang menunjukkan berapa banyak yang diterima dan berapa banyak uang yang diberikan kepada rumah tangga (Farida, 2013). Jika tingkat kemiskinan dijadikan indikator, pendapatan perempuan sangat bervariasi antarwilayah.

Metode Penelitian

Dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik per Agustus 2023, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari UMP dan kontribusi pendapatan perempuan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di tiga provinsi dengan beban kemiskinan tertinggi di Indonesia: Papua, Papua Barat, dan NTT. Penelitian ini akan menelusuri data yang terkumpul dari tahun 2015 hingga 2022, mencakup periode delapan tahun untuk memahami perubahan dan dinamika yang mungkin terjadi seiring waktu. Alasan pemilihan periode tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan data yang stabil dan konsisten dari sumber resmi BPS, dan periode tersebut mencakup rentang waktu yang signifikan, memungkinkan analisis dampak jangka panjang dari implementasi UMP dan kontribusi pendapatan perempuan terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian akan fokus pada analisis hubungan antara besaran UMP dan tingkat kemiskinan di ketiga provinsi tersebut, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana UMP memengaruhi tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian akan mengeksplorasi kontribusi pendapatan perempuan sebagai faktor mitigasi kemiskinan di wilayah tersebut.

Metodologi kuantitatif akan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dampak dari penerapan UMP dan menilai kontribusi pendapatan perempuan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menganalisis formula indikator yang digunakan untuk mengukur hubungan kausalitas dengan menggunakan teknik ekonometrik. Analisis kausalitas melibatkan penentuan sejauh mana perubahan dalam satu variabel dapat berpengaruh kepada perubahan dalam variabel lainnya. Metode ini membantu untuk memahami UMP dan kontribusi pendapatan perempuan terhadap peningkatan atau

penurunan kemiskinan di Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT. Metodologi penelitian melibatkan analisis regresi data panel di tiga provinsi selama rentang waktu yang diteliti, yaitu tahun 2015 hingga 2022. Data yang digunakan akan diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai dinamika ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah tersebut serta memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

EViews 12 digunakan sebagai alat analisis regresi pada data panel, sehingga model berikut dapat dibuat:

$$Yit = \beta 0 + \beta 1X1it + \beta 2X2it + eit \quad (1)$$

Keterangan:

Y_{it} = Kemiskinan provinsi ke-i tahun ke-t
β_0 = Konstanta/ Intersep
β_1, β_2 = Koefisien regresi data panel
X_{1it} = Upah minimum provinsi di provinsi ke-i tahun ke-t
X_{2it} = Kontribusi pendapatan perempuan di provinsi ke-i tahun ke-t
e_{it} = Kesalahan regresi unit *cross-section* ke-*i* untuk periode waktu ke-*t*

Untuk mengestimasi parameter model pada data panel, dapat menggunakan salah satu dari tiga metode: metode OLS biasa (juga dikenal sebagai *Pooled Least Squares* atau *Common Effect*), yang tidak memperhitungkan dimensi individu dan waktu. Kemudian, pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*) mengasumsikan perbedaan antara variabel-variabel individual dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap variasi dalam intersepnya. Dan Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*), yang menggantikan variabel dummy dengan variabel gangguan untuk mengatasi berkurangnya derajat kebebasan dan meningkatkan efisiensi parameter model data panel (Rahayu, 2021).

Uji statistik seperti uji Chow, Hausman, dan LM digunakan dalam analisis data panel untuk membandingkan dan memilih di antara model *Fixed Effect*, *Random Effect*, dan *Common Effect* untuk mencapai pemilihan model yang optimal. Dalam analisis data panel, tahap ini sangat penting untuk menjamin kecocokan model.

Uji asumsi klasik melibatkan pengujian autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas. Tujuan dari pengujian normalitas adalah untuk menilai apakah data penelitian terdistribusi secara normal. Untuk memastikan apakah ada ketidaksamaan varians residual data penelitian, uji heteroskedastisitas digunakan. Kemudian, mencari tahu apakah ada korelasi antara variabel-variabel independen dalam sebuah model regresi adalah tujuan dari uji multikolinearitas (Dodi Tirtana, Sepriyatno, 2023). Sementara uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi keberadaan korelasi antara nilai-nilai residual dalam deret waktu atau analisis regresi.

Uji F bertujuan untuk menentukan apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki dampak yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Sedangkan uji t yang juga disebut uji parsial digunakan untuk menilai dampak masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Uji t berguna untuk menentukan apakah suatu variabel independen memiliki dampak yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

Uji koefisien determinasi (*Adjusted* R^2) digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Kisaran nilai koefisien

determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Menurut Anggriawan et al. (2016), nilai yang mendekati satu mengindikasikan bahwa variabel dependen dapat diprediksi atau dijelaskan hampir seluruhnya oleh variabel independen.

Hasil dan Pembahasan

Estimasi Model

Uji Chow

Nilai *probabilitas cross-section F*, sebagaimana terlihat dari hasil uji Chow, adalah 0.0000, menandakan signifikansi yang lebih rendah dari alpha 5%. Dengan demikian, model efek tetap (FEM) adalah pilihan yang ideal untuk digunakan.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Prob.
Cross-section F	0.0000

Sumber: EViews diolah penulis, 2024

Uji Hausman

Nilai *probabilitas cross-section random* adalah 0,0000, sesuai dengan temuan dalam tabel uji Hausman. Temuan ini menegaskan bahwa model efek tetap (FEM) adalah pilihan yang lebih baik karena nilainya kurang dari alpha 5% (0,05).

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Prob.
Cross-section random	0.0000

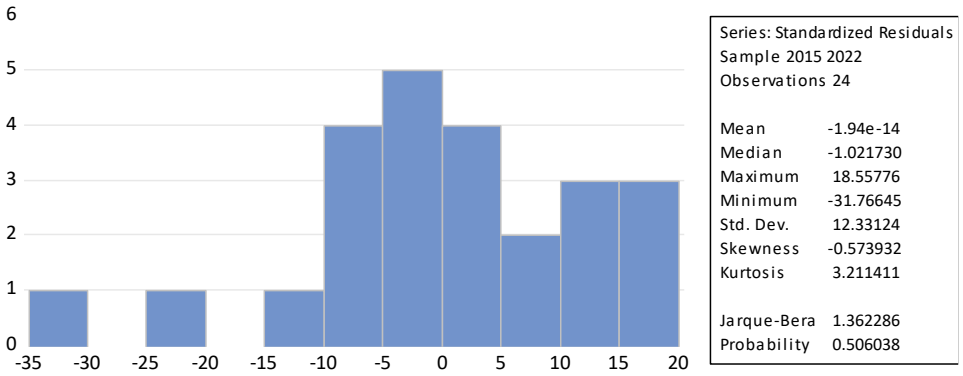
Sumber: EViews diolah penulis, 2024

Fixed effects model (FEM) lebih sesuai untuk penelitian ini, sebagaimana terlihat dari hasil uji Chow dan Hausman. Oleh karena itu, uji *Lagrange Multiplier* (LM) tidak diperlukan lagi karena dalam FEM, parameter efek tetap dianggap konstan di seluruh pengamatan, sehingga tidak ada korelasi antara variabel independen dan efek acak. Dalam konteks ini, pengujian keberadaan korelasi antara efek acak dan variabel independen, yang biasanya dilakukan dengan uji LM, tidak diperlukan dalam model efek tetap (Nick Klein-Huntington, 2021).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dengan nilai probabilitas sebesar 0,506038, hasil uji normalitas pada data menunjukkan nilai yang melebihi tingkat alpha 5% (0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi pada data penelitian ini, yang mengindikasikan bahwa data terdistribusi secara normal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Sumber: EViews diolah penulis, 2024

Uji Multikolinearitas

Nilai matriks korelasi antarvariabel adalah -0,503835, seperti yang dapat dilihat dari hasil yang ditampilkan pada tabel. Angka tersebut yang berada di bawah 0,8 ini menunjukkan tidak adanya korelasi yang signifikan antarvariabel independen. Hal ini berarti bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Correlation		
	UMP	IDG
UMP	1.000000	-0.503835
IDG	-0.503835	1.000000

Sumber: EViews diolah penulis, 2024

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel, diperoleh nilai probabilitas variabel independen > 0,05, yaitu probabilitas UMP sebesar 0,0747 dan probabilitas kontribusi pendapatan perempuan sebesar 0,4084. Ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap resabs, sehingga disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Prob.
C	0.6096
UMP	0.0747
IDG	0.4084

Sumber: EViews diolah penulis, 2024

Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat (DW) diketahui menunjukkan nilai 1.892942 berdasarkan tabel. Melalui perbandingan tabel Durbin-Watson dan nilai statistik, kita dapat menentukan apakah ada masalah autokorelasi atau tidak. Dengan jumlah data 33 (n) dan 2 variabel independen (k), hasil tabel Durbin-Watson (DW) pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan nilai dL dan dU berturut-turut sebesar 1,3212 dan 1,5770. Selain itu, nilai 4-dU adalah 2,423 dan nilai 4-dL adalah 2,6788. Dengan demikian, posisi DW berada pada dU < dW < 4-dU (1,5770 < 1,8929 < 2,423), menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi berdasarkan hasil penghitungan Durbin-Watson.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	.892942

Sumber: EViews diolah penulis, 2024

Model Regresi Data Panel

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	1085.599	6.986551	0.0000
UMP	3.23E-05	2.972882	0.0078
IDG	-11.37599	-2.319232	0.0317
Adjusted R-square	0.998870		
F-statistic	5083.520		
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: EViews diolah penulis, 2024

Dengan menggunakan perangkat lunak E-Views 12 dan menghasilkan estimasi model penelitian, yang dapat dinyatakan sebagai berikut dalam persamaan regresi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e$$

$$\text{Kemiskinan} = \beta_0 + \beta_1 \text{UMP} + \beta_2 \text{Kontribusi Pendapatan Perempuan}$$

$$\text{Kemiskinan} = 1085{,}599 + 3{,}23\text{E-}05\ \text{UMP} - 11{,}37599\ \text{KPP}$$

Nilai koefisien sebesar 1085,599 pada persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa kemiskinan akan menjadi 1085,599 jika variabel UMP (X_1) dan kontribusi pendapatan perempuan (X_2) diperhitungkan konstan. Kemudian, koefisien untuk UMP adalah sebesar 3,23E-05. Dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap konstan, kemiskinan akan meningkat sebesar 3,23E-05 jika UMP meningkat sebesar satu unit. Selanjutnya, koefisien kontribusi pendapatan perempuan adalah $-11{,}37599$. Hal ini berarti bahwa kemiskinan akan turun sebesar $11{,}37599$ jika kontribusi pendapatan perempuan naik sebesar 1% dan semua variabel independen lainnya dianggap konstan.

Uji Statistik

Uji Simultan (Uji-F)

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel UMP (X_1) dan kontribusi pendapatan perempuan (X_2) memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai F-statistik yang mencapai 5083,520 dengan probabilitas 0,000000 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh secara simultan. Nilai f-tabel adalah 3,32, hasil dari jumlah data sebanyak (n) 33 dan 3 variabel secara keseluruhan (k). Dapat dipastikan bahwa nilai f hitung (5083.520) melebihi nilai f tabel (3.32). Ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2022, secara simultan variabel UMP dan kontribusi pendapatan perempuan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan

F-statistic	5083.520
Prob (F-statistic)	0.000000

Sumber: EViews diolah penulis, 2024

Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 8 menunjukkan bahwa walaupun terdapat korelasi antara variabel-variabel dalam penelitian ini dengan arah yang berbeda, baik UMP maupun kontribusi pendapatan perempuan ternyata memberikan dampak yang signifikan (0,0078 dan 0,0317) terhadap kemiskinan di Papua, Papua Barat, dan NTT. Nilai t hitung UMP adalah 2,972882, sedangkan nilai t hitung kontribusi pendapatan perempuan adalah -2,319232. Dengan jumlah data (n) sebanyak 33 dan jumlah seluruh variabel (k) sebanyak tiga, maka didapatkan nilai t-tabel sebesar 2,04227. Variabel UMP memiliki hubungan positif, maka setiap peningkatan variabel ini akan mengakibatkan kenaikan kemiskinan yang signifikan. Sebaliknya, terdapat korelasi negatif antara variabel kontribusi pendapatan perempuan dan tingkat kemiskinan, menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi pendapatan perempuan akan berdampak dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	6.986551	0.0000
UMP	2.972882	0.0078
IDG	-2.319232	0.0317

Sumber: EViews diolah penulis, 2023

Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Nilai *adjusted R-squared* yang tercatat adalah 0,998870, setara dengan 99%, sesuai dengan temuan estimasi yang diperlihatkan dalam Tabel 3. Hal ini mengindikasikan bahwa semua variabel independen (kontribusi pendapatan perempuan dan upah minimum provinsi) dapat menjelaskan sekitar 99% dari variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan. Sedangkan 1% sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R-squared	0.998870

Sumber: Views diolah penulis, 2023

Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel upah minimum provinsi memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT selama periode 2015-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan UMP sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut. Temuan ini menguatkan penelitian (Tumangkeng, 2019) yang menemukan korelasi positif dan signifikan antara kemiskinan dan variabel UMP. Akan tetapi, temuan-temuan dari penelitian kami tidak mendukung teori hubungan antara UMP dan kemiskinan yang dikemukakan oleh sejumlah ekonom ternama, seperti Milton Friedman dan John Stuart Mill. Teori ini berpendapat bahwa kenaikan upah dapat membantu mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Ketika upah dinaikkan, pekerja dengan pendapatan rendah mungkin akan mendapatkan penghasilan lebih besar, yang pada gilirannya dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Papua dan Papua Barat memiliki UMP yang jauh lebih tinggi daripada NTT, yang mencerminkan perbedaan dalam tingkat inflasi, biaya hidup, dan perkembangan ekonomi di masing-masing provinsi. Papua adalah salah satu provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia. Besarannya jauh di atas rata-rata nasional karena Papua memiliki biaya hidup yang tinggi, terutama di daerah perkotaan seperti Jayapura. Begitu pun dengan Provinsi Papua Barat yang juga memiliki UMP yang relatif tinggi, meskipun tidak sebesar Papua. Keputusan pemerintah provinsi untuk menetapkan UMP yang tinggi mencerminkan komitmen untuk memberikan upah yang sesuai dengan standar hidup yang relatif mahal di wilayah ini (Rahayu, 2021). Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Papua dan Papua Barat. Di sisi lain, NTT adalah provinsi yang memiliki UMP yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Papua dan Papua Barat. Walaupun demikian, NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. UMP yang rendah di NTT mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat perkotaan.

Upah minimum ditetapkan untuk memastikan bahwa pekerja, terutama yang bekerja dalam pekerjaan dengan tingkat keterampilan rendah, mendapatkan upah yang layak (Ansori, 2018). Oleh karena itu seharusnya apabila terjadi kenaikan UMP maka dapat mengurangi angka kemiskinan, karena dengan menetapkan upah minimum yang memadai, pekerja memiliki potensi penghasilan yang lebih tinggi, sehingga dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan (Qurrotu'aini & Bagus Putu Purbadharmaja, 2023). Ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan pekerja dan keluarganya.

Lalu mengapa hasil penelitian kami memiliki korelasi positif? Dalam teori hubungan upah minimum dan kemiskinan, dijelaskan bahwa efek UMP tinggi tidak selalu sejalan dengan pengurangan kemiskinan, terutama jika peningkatan UMP tidak sebanding dengan tingkat inflasi atau jika ada masalah lain yang memengaruhi akses pekerja berpendapatan rendah ke pekerjaan (Feriyanto et al., 2020). Kenaikan UMP di

satu provinsi dapat memengaruhi biaya hidup secara keseluruhan, terutama dalam hal harga barang dan jasa (Anggriawan et al., 2016). Dalam kasus kenaikan UMP, perusahaan mungkin akan meningkatkan harga produk atau layanan mereka untuk menutupi biaya tambahan yang terkait dengan pembayaran upah yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan kenaikan biaya hidup secara umum di wilayah tersebut, termasuk di Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kemiskinan karena warga setempat mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Secara khusus, peningkatan upah minimum berpotensi menimbulkan biaya yang lebih tinggi bagi pemberi kerja, memaksa mereka untuk mengurangi angkatan kerja. Hal ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan meningkatnya angka kemiskinan (Sen et al., 2011). Selain itu, kenaikan UMP bisa memicu inflasi di suatu wilayah. Ketika harga barang dan jasa meningkat, daya beli penduduk mungkin akan menurun. Individu yang hidup di bawah garis kemiskinan bisa mengalami dampak negatif dari situasi ini, terutama di wilayah-wilayah seperti Papua, Papua Barat, dan NTT yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Dengan demikian, dampak kenaikan UMP pada tingkat kemiskinan dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk besarnya kenaikan UMP, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pengaruh Kontribusi Pendapatan Perempuan terhadap Kemiskinan

Kontribusi pendapatan perempuan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya arah hubungan negatif dan signifikan antara pendapatan perempuan dan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan perempuan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh (Wulandari & Ratnasari, 2022) yang juga menemukan bahwa pendapatan perempuan berpengaruh signifikan dan terbalik terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian kami pun sudah sesuai dengan teori, baik teori keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja maupun teori pemberdayaan perempuan. Teori-teori tersebut mengemukakan bahwa ketika lebih banyak perempuan terlibat dalam angkatan kerja dan memperoleh pendapatan yang layak, tingkat kemiskinan akan menurun.

Di Papua, terdapat kesenjangan pendapatan gender yang signifikan. Menurut data BPS, untuk melakukan pekerjaan yang sama atau yang sebanding, perempuan biasanya menerima bayaran yang lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian, di banyak wilayah Papua, perempuan berperan penting dalam sektor pertanian. Mereka berkontribusi dalam produksi makanan, terutama dalam budidaya sagu, yang merupakan makanan pokok di wilayah tersebut. Sementara di Papua Barat, banyak perempuan terlibat dalam pekerjaan informal seperti penjual kaki lima atau pedagang kecil. Dan di beberapa daerahnya, perempuan terlibat dalam usaha mikro dan kecil, seperti pengolahan makanan tradisional atau kerajinan tangan. Ini adalah bentuk pekerjaan dengan pendapatan yang sering kali tidak stabil. Di NTT sendiri, banyak perempuan terlibat dalam sektor pertanian. Mereka berperan dalam produksi makanan dan pengolahan produk pertanian, yang dapat memengaruhi ketersediaan pangan dan pendapatan keluarga. Oleh sebab itu, ketika kontribusi pendapatan perempuan di wilayah-wilayah tersebut meningkat, hal ini memiliki potensi untuk mengurangi

kemiskinan di wilayah tersebut karena perempuan memainkan peran kunci dalam ekonomi rumah tangga dan komunitas. Dengan peningkatan pendapatan dari UMKM maupun peningkatan produktivitas serta pendapatan dari sektor pertanian, perempuan dapat membantu keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi risiko kemiskinan di wilayah ini (Adnan & Amri, 2020).

Kontribusi pendapatan perempuan yang meningkat akan secara langsung meningkatkan total pendapatan rumah tangga (Dahlia, 2019). Hal ini memungkinkan keluarga memiliki sumber daya keuangan tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pendidikan (Abda & Cahyono, 2022). Dengan pendapatan yang lebih tinggi, keluarga memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola keuangan mereka dan mengurangi risiko kemiskinan (Farida, 2013). Selain itu, ketika perempuan memiliki pendapatan tambahan, mereka lebih cenderung menginvestasikan sebagian dari pendapatan mereka dalam pendidikan anak-anak mereka. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat membantu anak-anak memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk akhirnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi di masa depan, yang akan mengurangi risiko kemiskinan generasi berikutnya.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum provinsi cenderung berhubungan dengan peningkatan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut, yang mencatat adanya potensi dampak yang kontraproduktif dari peningkatan UMP dalam konteks tersebut. Hal ini dapat terjadi karena sejumlah faktor yang berbeda, seperti potensi peningkatan biaya hidup yang tidak sebanding dengan kenaikan UMP dan faktor lain yang memengaruhi ekonomi wilayah tersebut. Di sisi lain, kontribusi pendapatan perempuan secara statistik memiliki efek signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Ini menunjukkan pentingnya meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi dan memberikan akses yang lebih baik ke peluang ekonomi bagi mereka. Dalam konteks ini, hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang hati-hati dan terkoordinasi terkait peningkatan UMP. Meskipun UMP dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, diperlukan pemahaman lebih lanjut tentang dampaknya terhadap penurunan kemiskinan. Fokus pada peningkatan kontribusi pendapatan perempuan dalam ekonomi regional juga dapat secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan. Kesimpulan ini menekankan perlunya kebijakan seimbang dan berkelanjutan, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di suatu wilayah.

Pemerintah sebaiknya melakukan penilaian yang cermat untuk memastikan bahwa peningkatan UMP tidak berdampak negatif pada tingkat kemiskinan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam ekonomi. Hal ini mencakup peningkatan akses perempuan ke peluang kerja, pelatihan, dan pendidikan. Individu, terutama perempuan, harus berupaya untuk meningkatkan keterampilan mereka agar lebih kompeten dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Ini termasuk pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam dunia kerja.

Referensi

Abda, S. A., & Cahyono, H. (2022). Apakah IPM, pengangguran, dan pendapatan

perempuan berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan di Kota Surabaya? *Independent: Journal of Economics*, *2*(1), 61–76. https://doi.org/10.26740/independent.v2i1.43769

Adnan, G., & Amri, K. (2020). Apakah pendapatan perempuan dapat mengurangi kemiskinan? Bukti data panel di Indonesia. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, *8*(1), 64. https://doi.org/10.35314/inovbiz.v8i1.1235

Anggriawan, S. Y., Soelistyo, A., & Susilowati, D. (2016). Pengaruh upah minimum dan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *14*(2), 218. https://doi.org/10.22219/jep.v14i2.3893

Ansori, J. P. (2018). Analisis pengaruh penyerapan tenaga kerja dan upah minimum pekerja terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, *3*(1), 555–572.

Badan Pusat Statistik. (2023). Diakses dari https://www.archive.bps.go.id/

Dahlia, D. (2019). Kontribusi pendapatan perempuan terhadap pendapatan rumah tangga (Studi Pasar Sentral Majene Sulawesi Barat). *An-Nisa*, *11*(2), 458–466. https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.330

Dodi Tirtana, Sepriyatno, M. S. F. (2023). Perbandingan pengaruh indeks pembangunan manusia pada Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, *6*(2), 22–31.

Farida, L. (2013). Kontribusi pendapatan perempuan bekerja sektor informal pada ekonomi keluarga di Kota Pekanbaru. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, *1*(2), 103–112.

Faritz, M. N., & Soejoto, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *8*(1), 15–21. https://doi.org/10.26740/jupe.v8n1.p15-21

Feriyanto, N., El Aiyubbi, D., & Nurdany, A. (2020). The impact of unemployment, minimum wage, and real gross regional domestic product on poverty reduction in Provinces of Indonesia. *Asian Economic and Financial Review*, *10*(10), 1088–1099.

Klein-Huntington, Nick. (2021). The effect an introduction to research design and causality. Penerbit CRC Press.

Qurrotu'aini, L., & Purbadharmaja, I. B. P. (2023). The effect of minimum wage and per capita expenditure on poverty in provincial districts D.I. Yogyakarta. *Jurnal Syntax Admiration*, *4*(9), 1518–1528. https://doi.org/10.46799/jsa.v4i9.712

Rahayu, C. T. (2021). Analisis faktor-faktor pembentuk kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia periode 2010-2018. *UMSLibrary*.

Sen, A., Rybczynski, K., & Van De Waal, C. (2011). Teen employment, poverty, and the minimum wage: Evidence from Canada. *Labour Economics*, *18*(1), 36–47. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2010.06.003

Tumangkeng, R. Y. S. D. C. R. S. Y. L. (2019). Pengaruh upah minimum dan investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *19*(01), 88–98.

Wulandari, M. C., & Ratnasari, D. F. (2022). Hubungan pendapatan perempuan dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Karesidenan Kartasura. *Webinar dan Call for Papers Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2022*, *September*.